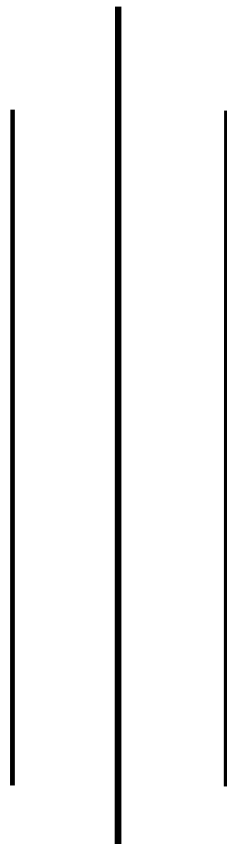


**RENCANA STRATEGIK
2013-2018
(RENSTRA)**



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
(BKKBD)
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatNya sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil disusun.

Penyusunan Rencana Strategi bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara pertanggung jawaban kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman ada rancangan awal RPJM 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Bupati Minahasa Tenggara.

Penyusunan Renstra bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013-2018 tercapai serta mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholders) monitoring, analisa data, evaluasi/ pemantauan program baik secara internal maupun eksternal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini, selanjutnya kami berharap kiranya dapat memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Terima Kasih.

Ratahan, Februari 2016
KEPALA DPPKB,

dr. SAUL E. ARIKALANG, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196112301989101001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	
B. Landasan Hukum.....	
C. Maksud dan Tujuan.....	
D. Sistematika penulisan.....	
BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB.....	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	
B. Sumber Daya SKPD	
C. Kinerja Pelayanan SKPD.....	
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi...	
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	
C. Telaah Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten.....	
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan.....	
E. Penentuan Isu- isu strategis	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.....	
A. Visi dan Misi	
B. Tujuan dan Sasaran.....	
C. Strategi dan Kebijakan.....	
D. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	
BAB VI Penutup.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan dua komitmen nasional yang sangat penting. Program keluarga berencana diamanatkan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dan peraturan pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dan yang terakhir diatur dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Program KB sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai faktor diantaranya dukungan manajemen yang handal dan dapat mengarahkan pengelolaan program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program KB pada hakekatnya memiliki arti yang sangat penting dan sangat strategis untuk menyusun langkah-langkah dalam pembangunan karena memiliki makna yang sangat luas yaitu menyeimbangkan daya tampung, daya dukung lingkungan dengan penduduk, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan penduduk serta memberikan dukungan pada upaya pembentukan dan peningkatan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan memberikan daya ungkit pada indeks pembangunan nasional.

Program KB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan penyusunan rencana strategis bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik faktor internal yaitu: kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses) maupun faktor eksternal yaitu peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Rancangan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RPMJ 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan penjabaran Visi dan Misi dan program Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai mekanisme yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rancangan renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berisi informasi tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, pembiayaan, keluaran dan dampak. Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah;

1. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013-2018.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholders), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama dalam pencapaian program yang lebih maksimal.
4. Menjadi acuan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk mengantisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis, adaptasi perkembangan dalam memanfaatkan peluang dan tantangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Di samping itu Renstra Badan Kependudukan dan KB juga merupakan instrumen untuk menentukan arah pembangunan dalam pelaksanaan dan, memberi gambaran tentang Visi, Misi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Badan Kependudukan dan KB.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 - 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- C. Telaah Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Penentuan Isu- isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.....

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran.....

C. Strategi dan Kebijakan.....

D. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

**BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif.....**

BAB VI Penutup.....

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Badan Kependudukan dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Badan Kependudukan dan KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kependudukan dan KB melaksanakan fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas badan;
- b) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Penyelenggaraan pembinaan dan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- c) Bidang Pengendalian Penduduk membawahkan:
 - 1) Subbidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan
 - 2) Subbidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan
- d) Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
 - 1). Subbidang Keluarga Berencana
 - 2). Subbidang Kesehatan Reproduksi
- e) Bidang Keluarga Sejahtera membawahkan:
 - 1). Subbidang Kesejahteraan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - 2). Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- f) Bidang Data, Informasi, Advokasi dan Penggerakan membawahkan :
 - 1). Subbidang Data dan Informasi
 - 2). Subbidang Advokasi dan Penggerakan.
- g) UPT
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumber Daya SKPD

1. Personil

Peran dan tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dalam mengarahkan proses pembangunan kependudukan dan KB dapat berjalan efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

Tabel ini memberikan gambaran tentang profil sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan.

**Tabel Profil Sumber daya Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No.	Gol.	Pendidikan							Total
		S-3	S-2	S-1	D-III/I	SLTA	SLTP	SD	
1.	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1
4.	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	IV/a	-	-	3	-	-	-	-	3
	Total Gol. IV	-	1	3	-	-	-	-	4
1.	III/d	-	-	3	-	2	-	-	5
2.	III/c	-	1	1	-	2	-	-	4
3.	III/b	-	-	-	-	1	-	-	2
4.	III/a	-	-	1	-	-	-	-	1
	Total Gol. III	-	1	5	-	5	-	-	11
1.	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	II/b	-	-	-	-	1	-	-	1
4.	II/a	-	-	2	-	1	-	-	3
	Total Gol. II	-	-	2	-	2	-	-	4
1.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	2	10	-	7	-	-	19

Selanjutnya, Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang keadaan potensi sumberdaya aparatur yang ada di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan.

Tabel
Profil Sumber daya Manusia
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No.	Jabatan	Gol.	Pendidikan				Total
			S-3	S-2	S-1	D-III	
A	STRUKTURAL						
1.	Kepala Badan (Eselon IIb)	IV/a	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris (Eselon IIIa)	IV/a	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang (Eselon IIIb)	IV/b	-	-	-	-	-
		IV/a	-	-	2	-	2
		III/d	-	-	1	-	1
		III/c	-	-		1	1
4.	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang (Eselon IVa)	IV/a	-	-	-	-	-
		III/d	-	-	2	1	3
		III/c	-	1	1	-	2
		III/b	-	-	1	1	2
B	FUNGSIONAL		-	-	3	3	6
	Total		-	2	11	6	19

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	10
3.	D3	1
4.	SLTA	6
Jumlah		19

2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1.	Spamen /PIM II	1
2.	Spama / PIM III	3
3.	Adum / PIM IV	1
Jumlah		5

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	4
3.	III	11
4.	IV	4
Jumlah		19

4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Fungsional dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	7
4.	Fungsional	4
5.	Staf	2
Jumlah		19

2. Peralatan

Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan maupun pembelian sejak tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel II.6.

Tabel II.6
Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai tahun 2016)

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Sepeda Motor	27 Unit
2.	Alat Kedokteran KB Lain	173 Set
3.	Mobil Unit Penerangan	1 Unit
4.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1 Unit
5.	Lemari Kayu	4 Unit
6.	Kursi Rapat	1 Buah
7.	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	5 Buah
8.	Kursi Kerja	10 Buah
9.	Rak Piring	2 Buah
10.	Televisi	1 Buah
11.	Meja Kerja	7 Buah
12.	Kursi tamu Ruang Tunggu Pjbt Eselon II	1 Buah
13.	Meja Rapat	1 Buah

14.	Kursi Tamu	1 Buah
15.	Publik Adres (Lapangan)	7 Unit
16.	Alat Komunikasi Sosial Lain lain	36 Unit
17.	Geneacologie Tafel	8 Unit
18.	Bangunan Gudang tertutup Permanen	1
19.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	12
20.	Jaringan Distribusi Lain-lain	2
21.	Karya seni cetak/grafis(Art Point)	1 Buah
22.	Alat Kantor lainnya (lain-lain)	14 Buah
23.	Wireles	6 Buah
24.	P.C Unit/Komputer PC	12 Unit
25.	Laptop	4 Unit
26.	Mesin Absensi	1 Unit
27.	Note book	1 Unit
28.	Printer	11 Unit
29.	UPS	3 Unit
30.	Alat Kesehatan Kebidanan Lain-lain	4 Unit
31.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5 Set
32.	Lemari Besi	2
33.	Genset	1 Unit
34.	Gordyn	1 Unit
35.	AC Unit	1 Unit
36.	Alat rumah tangga lain-lain	1 Set
37.	Handy talkie	1 Buah
38.	Alat Komunikasi Sosial Lain - lain	1 Buah
39.	Station Wagon	1 Unit
40.	Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang)	1 Unit
41.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
42.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9 Buah
43.	Lemari Arsip Dinamis	4 Buah
44.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
45.	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
46.	Meja Kerja	2 Buah
47.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2 Buah
48.	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	2 Buah
49.	CCTV	1 Buah

Sumber : (BKKBD) Kabupaten Minahasa Tenggara

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menghasilkan capaian program yang telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang KB, hal ini memberikan capaian bahwa pelaksanaan pelayanan KB dapat terarah dan terukur.

Cakupan Pelayanan Bidang KB Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nasional		Target Capaian SPM oleh Daerah	Realisasi
		Target Capaian	Thn Target Capaian		
1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1 Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	100	2018	3,5%	3,5%
	2 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 88%	100	2018	88%	88%
	3 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100	2018	5%	5,3%
	4 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB 70%	100	2018	74%	74%
	5 Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB 87%	100	2018	68.90%	50%
	6 Ratio petugas lapangan keluarga berencan/penyulu keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (DUA) desa/kelurahan	100	2018	20/24	54,1%
	7 Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan	100	2018	144	100%
2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	8 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 75% setiap tahun.	100	2018	75%	100%
3. Penyediaan informasi data mikro	9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.	100	2018	100%	100%

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1) Tantangan

- a) Tingginya perkawinan usia muda (<20 tahun bagi wanita).
- b) Meningkatnya jumlah keluarga kurang mampu (Pra Sejahtera dan KS 1)
- c) Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan yang masih rendah
- d) Jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang makin berkurang

2) Peluang

- a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- b) Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan, Tokoh agama dan masyarakat yang secara kuantitas cukup memadai
- c) Adanya dukungan stakeholder baik dari pemerintah maupun swasta.
- d) Berkembang luasnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam kehidupan masyarakat
- e) Adanya kuota penerimaan penerimaan pegawai negeri sipil setiap tahun.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. MINAHASA TENGGARA**

KEPALA BADAN
dr. SAUL E.ARIKALANG, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196112301989101001

SEKRETARIS
KISMAN A.JUNUS,SPd
PEMBINA, IV/A
NIP. 196301241986031013

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**SUB BAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN**
DEDDY SIWI, M.Kes
PENATA, III/c

**SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**
TENNY M.TULANDI
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 197305141993031004

**SUB BAG KEUANGAN/
PERLENGKAPAN**

BID. PENGENDALIAN PENDUDUK
HELDA MOKAT,SPd
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 196608041988032017

BID. KELUARGA BERENCANA
JEEN J.TULENGKEY,SE
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 197501061994032002

BID. KELUARGA SEJAHTERA
JULIEN KULA, S.Kep,Ns
PENATA, III/c
NIP. 197907302003122006

**BID. DATA, INFORMASI, ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN**
FIENTJE MONINGKA,SPd
PENATA Tkt I,III/d
NIP. 196702161992082001

**SUB BID. PENYERASIAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN**
OLDA MAWARA,SE
PENATA MUDA TKT I,III/b
NIP. 198510302010012007

SUB BID. KELUARGA BERENCANA
JELLY J.KATUHE, Amd.Keb
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 196807301989102001

**SUB BID. KESEJAHTERAAN KETAHANAN
KELUARGA**
JAFRY P.KAWULUSAN,SPd
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 1968011081198031001

SUB BID. DATA DAN INFORMASI
JANTJE IROTH,SE
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 195807241990031001

**SUB BID. PERENCANAAN &ANALISA DAMPAK
KEPENDUDUKAN**

SUB BID. KESEHATAN REPRODUKSI
ERMY J.BOLUNG
PENATA Tkt. I, III/d
NIP. 196510161987121002

**PLT SUB BID. PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA**
REINNA S.OWU
PENATA MUDA, III/A
NIP. 196609301995032003

SUB BID. ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
Jafry Kawulusan, S.P.d

UPT KEC

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa Permasalahan yang dihadapi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun)

Perkawinan usia muda yaitu perkawinan dimana usia pengantin wanita < 20 tahun. Perkawinan usia muda mempunyai pengaruh yang besar terhadap Program KB karena masa subur akan lebih panjang sehingga kemungkinan kesempatan punya anak lebih banyak, terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia sulit diwujudkan, keharmonisan dan ketahanan keluarga rentan, serta keluarga berkualitas.

- 2) Meningkatnya jumlah Keluarga Kurang Mampu (Prasejahtera dan Sejahtera I)

Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I Merupakan sebagian besar adalah masyarakat yang perlu diperhatikan karena bila makin bertambahnya jumlah penduduk miskin berarti menghambat kemajuan perekonomian di kabupaten minahasa Tenggara .faktor Penyebabnya karena banyak Ibu- ibu yang belum memahami pentingnya Ber-KB sehingga kebanyakan keluarga Prasejahtera yang paling banyak memiliki anak Lebih dari Dua.

- 3) Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) masih rendah.

Makin berkembangnya Program KB maka peran IMP untuk mensukseskan program kependudukan dan keluarga berencana menjadi semakin meningkat. Peningkatan kualitas IMP mutlak diperlukan hal ini juga seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan transparansi. Tanpa peningkatan kualitas IMP dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Program KKB maka keberhasilan program KKB sulit diwujudkan karena IMP merupakan motor penggerak didesa dan sebagai alat untuk meneruskan Informasi mengenai Keluarga Berencana dan Kependudukan.

- 4) Jumlah Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Makin Berkurang

Makin berkembangnya Program KB apalagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi, maka disamping program keluarga berencana juga kependudukan dilaksanakan secara beriringan/sejalan. Disisi lain jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) semakin berkurang, karena setiap PKB/PLKB harusnya 1 PLKB membina 3 Desa

Beranjak dari Permasalahan tersebut,maka Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah untuk Kurun waktu Lima tahun ke depan,terfokus pada Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan,terutama:

1. Peningkatan Kesertaan Ber-KB
2. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Peningkatan Pengendalian Penduduk
4. Peningkatan Advokasi Pergerakan dan Informasi

B. Telaah Visi dan Misi RPJM Kabupaten Minahasa Tenggara

Visi Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara adalah : **“Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020”** dengan maksud adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan wilayah yang ditempati sehingga tercapainya kesejahteraan.

Sedangkan Misi yang ditetapkan adalah Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dilakukan melalui :Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, Penetapan parameter penduduk, Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi, Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB, Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB, Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga dan memantapkan *Program Tribina* (BKB, BKR, BKL) dalam mewujudkan Keluarga Harmonis., Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KS , Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan pemenuhan hak klien KB, Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan usia lanjut :

Tabel Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan Kependudukan dan keluarga berencana daerah

Visi : Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020				
No.	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera			
1.	Program Keluarga Berencana	Kurangnya Kesadaran akseptor dalam Ber-KB	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Dana
2.	Program Ketahanan dan Keluarga sejahtera	Kurangnya peran serta masyarakat	Sikap dan Mental Masyarakat	Ketersediaan Dana
3.	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	Kurangnya peran serta masyarakat	Sikap dan Mental Masyarakat	Ketersediaan Dana
4.	Program Advokasi Pergerakan dan Informasi	Kurangnya peran serta masyarakat	Sikap dan Mental Masyarakat	Ketersediaan Dana

C. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga (BKKBN)

Amanah RPJMN, untuk membangun kualitas SDM yang berkualitas, berkarakter dan mempunyai daya saing tinggi, salah satu fokus prioritas pembangunan bidangnya adalah melalui pengendalian penduduk yang difokuskan kepada *revitalisasi program KB, penyerasian data dan informasi kependudukan* dari berbagai sumber seperti sensus, survey dan data registrasi vital. Namun yang menjadi amanah BKKBN adalah *revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan kependudukan*. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena telah ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah diterbitkan, dimana BKKBN yang tadinya badan yang menangani program KB Nasional saja akan berubah fungsinya termasuk kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas. Mengingat penanganan masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor terkait, maka sinergi dan integrasi antar program harus kita lakukan.

Ini semua memerlukan stakeholders untuk lebih meningkatkan komitmennya agar pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB dapat mencapai sasaran RPJMN Berkaitan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

D. Penentuan Isu- Isu Strategis

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Badan Keluarga Berencana dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- 1) Menurunkan Unmetneed/pasangan Usia Subur Ingin Ber-KB
 1. Meningkatkan Cakupan Anggota BKB Ber-KB
 2. Meningkatkan Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri
 3. Terpenuhinya Rasio Penyuluh Kb/Plkb Untuk Setiap Dua Desa/Kel
 4. Terpenuhinya Rasio PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan
 5. Meningkatkan Cakupan Ketersediaan Alokasi
 6. Meningkatkan Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan
- 2) Menurunkan Rata-rata laju pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran total
 1. Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga
 2. Menurunnya Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga
 3. Menurunnya Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun
 4. Menurunnya CPR (contraceptive Prevalens Rate)
 5. Meningkatkan Peserta KB Baru
 6. Meningkatkan Peserta KB Aktif
 7. Meningkatkan Peserta KB Baru MKJP
 8. Meningkatkan Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS 1
 9. Tersedianya Grand Desing Pengendalian Penduduk

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi, Misi Badan Kependudukan dan KB

Visi Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai berikut :

“Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020”.

Misi : ***Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera,***

dilakukan melalui :

- 1) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
- 2) Penetapan parameter penduduk
- 3) Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi
- 4) Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB
- 5) Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB
- 6) Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga dan memantapkan *Program Tribina* (BKB, BKR, BKL) dalam mewujudkan Keluarga Harmonis.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KS
- 8) Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan pemenuhan hak klien KB
- 9) Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan usia lanjut ; .

B. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, atau gambaran kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal / eksternal dan selaras dengan perwujudan visi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian Keluarga Berencana
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

C. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dengan memperhatikan hasil yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan dalam nilai kualitatif/kuantitatif. Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan Kemandirian Keluarga Berencana Melalui:

- 1) Menurunkan Unmetneed / Pasangan Usia Subur ingin ber KB yang tidak terpenuhi menjadi 6,5%; di tandai dengan :
 - a) Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB hingga 78,20% di periode akhir Renstra
 - b) Meningkatnya Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri hingga 72 % di akhir periode Renstra
 - c) Terpenuhinya Rasio penyuluh KB/petugas lapangan KB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan hingga 20 penyuluh Lapangan KB /144 desa
 - d) Terpenuhinya Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan hingga 100%
 - e) Meningkatnya Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi hingga 100%
 - f) Meningkatnya Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan hingga 100%

- 2) Menurunkan Rata-rata laju pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran total ditandai dengan :
 - a) Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga
 - b) Menurunnya Jumlah Jiwa dalam Keluarga
 - c) Menurunnya Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun
 - d) Meningkatnya CPR (contraceptive Prevalens Rate)
 - e) Meningkatnya Peserta KB Baru
 - f) Meningkatnya Peserta KB aktif
 - g) Meningkatnya Peserta KB baru metode MKJP
 - h) Menurunnya Jumlah Keluarga KPS dan KS I
 - i) Tersedianya Grand Design Pengendalian Penduduk

D. Strategi

Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Minahasa Tenggara adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan KB dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui penilaian faktor Internal dan Eksternal atau dikenal dengan *Analisis SWOT*.

Analisis SWOT (Strenght,Weaknesses,Opportunities,Threats) merupakan kompleksitas permasalahan Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa tenggara sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat ata meningkatkan kekuatan atau peluang.

Analisis SWOT untuk Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai Berikut:

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas 2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai 3. Adanya dukungan pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan yang belum optimal 2. Disiplin dan etos kerja yg masih kurang 3. Anggaran terbatas
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan mengikuti pelatihan. 2. Adanya pedoman/aturan yang jelas 3. Adanya forum-forum pertemuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan struktur organisasi dan tupoksi yang jelas serta menambah wawasan teknis melalui diklat 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mensosialisasikan aturan perundang-undangan yang ada. 3. Memanfaatkan dukungan pimpinan dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan melalui pelatihan teknis. 2. Tingkatkan disiplin dan etos kerja PNS dengan menerapkan aturan yang berlaku. 3. Optimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan forum-forum pertemuan
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan instansi dan mitra kerja belum efektif 2. Keadaan wilayah kerja 3. Perubahan kebijakan terhadap peraturan dibidang Kependudukan dan KB dan pemberdayaan peraturan. 	<p>Memanfaatkan dukungan pimpinan dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan melalui koordinasi dengan instansi serta mitra kerja 2. Tingkat disiplin dan etos kerja di wilayah kerja yang ada 3. Optimalkan anggaran yang ada untuk mengantisipasi setiap perubahan kebijakan terhadap peraturan.

a. Kekuatan (Strength) :

1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas
2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya dukungan pimpinan

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan melalui pelatihan teknis
2. Tingkatkan disiplin dan etos kerja PNS dengan menerapkan aturan yang mengikat.
3. Optimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan forum-forum pertemuan

c. Peluang (Opportunities)

1. Kesempatan mengikuti pelatihan
2. Adanya pedoman/aturan yang jelas
3. Adanya forum-forum pertemuan

d. Ancaman (Threats)

1. Koordinasi dengan instansi dan mitra kerja belum efektif
2. Keadaan wilayah kerja
3. Perubahan kebijakan terhadap peraturan dibidang Kependudukan dan KB dan pemberdayaan peraturan.

Model matriks SWOT ini menghasilkan empat strategi yaitu:

1. Strategi SO : mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi ST : menggunakan kekuatan untuk mencegah/mengatasi ancaman
3. Strategi WO : mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Strategi WT : mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman

Dari hasil kajian matriks SWOT diatas dapat dilihat berbagai strategi yang dihasilkan secara lengkap hasil kajian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Strategi SO,yaitu:

1. Memanfaatkan struktur organisasi dan tupoksi yang jelas serta menambah wawasan teknis melalui diklat.
2. memanfaatkan sarana dan prasarana yangtersedia untuk mensosialisasikan aturan perundang-undangan yang ada.
3. Memanfaatkan dukungan pimpinan dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan.

b. Strategi (ST),yaitu:

1. Memanfaatkan dukungan pimpinan dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan.
2. memanfaatkan sarana dan prasarana yangtersedia untuk mensosialisasikan aturan perundang-undangan yang ada.
3. Memanfaatkan dukungan pimpinan dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan.

c. Strategi (WO) Yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan melalui Bimtek
2. Meningkatkan disiplin dan etos kerja dengan menerapkan aturan yang ada
3. Mengoptimalkna anggaran yang ada untuk menunjang kegiatan

d. Strategi (WT) yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi serta mitra kerja untuk meningkatkan kualitas petugas lapangan KB
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengantisipasi perubahan perubahan kebijakan terhadap peraturan.

E. Kebijakan

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kependudukan dan KB merumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan Alokun (alat obat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (pra sejahtera dan keluarga sejahtera I)
2. Meningkatkan pelayanan KIE dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi.
3. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, serta kesehatan Ibu Bayi dan Anak.
4. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra Sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Mewujudkan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
6. Peningkatan kualitas SDM mengolah data informasi dan administrasi program kependudukan dan KB Daerah dan Nasional.

Tabel : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Kemandirian Keluarga Berencana	Menurunkan unmetneed/Pasangan usia subur ining ber-KB	Meningkatnya Cakupan Anggota BKB Ber-KB	%	68,30	69,70	72	74	76	78,20	78,20
			Meningkatnya Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKs Yang Ber-KB Mandiri	%	62,70	64,90	66,70	68,90	70	72	72
			Terpenuhinya Rasio Penyuluh Kb/Plkb Untuk Setiap Tiga Desa/Kel	Org	12	15	18	20	22	24	24
			Terpenuhinya Rasio PPKBD Setiap Desa/Kelurahan	Org	144	144	144	144	144	144	100
			Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Alokasi	%	60	65	70	75	80	85	85
			Meningkatnya Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan	Dokumen	144	144	144	144	144	144	144
			Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Org	2,75	2,75	2,7	2,65	2,6	2,5	2,4
2	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang melalui Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	Menurunkan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran Total	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	Org	4	4	4	4	4	4	4
			Menurunnya Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun	Akseptor	450	400	375	350	325	300	300
			Menurunnya CPR (contraceptive Prevalens Rate)	%	86	86,5	87,5	88	88,5	89	89
			Meningkatnya Peserta KB Baru	Akseptor	65	68	70	75	78	79	79
			Meningkatnya Peserta KB Aktif	Akseptor	86	86,5	87,5	88	88,5	89	89
			Meningkatnya Peserta KB Baru MKJP	Akseptor	780	823	765	623	654	623	623
			Menurunnya Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS 1	Akseptor	41,27	41,14	40,2	37,5	36,3	35,11	35,11
			Tersedianya Grand Desing Pengendalian Penduduk	Dokumen	0	0	0	1	0	1	1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara disertai kebutuhan pendanaan, disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada.

Program Pokok :

1. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk
2. Program Peningkatan Advokasi, Penyuluhan dan informasi
3. Program Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana
4. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rancangan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibuat pada bulan November tahun 2013, karena baru dipisahkan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Badan Kependudukan dan KB (BKKBD). Renstra ini di buat untuk tahun 2013-2018 berisi informasi tentang program dan kegiatan, pembiayaan, keluaran dan dampak. Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Rancangan Rencana Strategis SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kab.Minahasa Tenggara disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Minahasa Tenggara.

Semoga Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan guna terwujudnya *Clean Governance and Good Governance* selama 5 (lima) tahun ke depan.

Ratahan, Februari 2016
KEPALA BKKBD,

dr. SAUL E. ARIKALANG, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196112301989101001

NC	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	URUSAN /BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	lokasi	Target Renstra pada tahun 2018(akhir periode Renstra SKPD)		Capaian kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kerja Pada Akhir Periode renstra		Ket
								K	Rp	Tahun I (2015)		Tahun II (2016)		Tahun III (2017)		Tahun IV (2018)		14		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Menyediakan pakaian khusus hari-hari tertentu	keseragaman pakaian	jumlah pegawai yang menerima pakaian seragam hari tertentu		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BKKBD	120 psg	24,000,000	30	6,000,000	30	6,000,000	30	6,000,000	30	6,000,000			
	Menyediakan pakaian dinas serta perlengkapannya	keseragaman pakaian	jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas dan perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	BKKBD	120 psg	52,500,000	30	7,500,000	30	10,000,000	30	15,000,000	30	20,000,000	52,500,000		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BKKBD													
	Menyediakan Aparatur Sipil Negara yang terdidik terlatih	Diklat Penjenjangan	jumlah ASN yang mengikuti diklat		Pendidikan dan Pelatihan formal	Jlh pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal terpenuhi	BKKBD	12 org	371,261,000	1	31,261,000	4	100,000,000	4	120,000,000	3	120,000,000	371,261,000		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		BKKBD													
	Menyediakan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi	Laporan capaian kinerja dan realisasi	jumlah laporan		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jlh laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja terpenuhi	BKKBD	48 kali	253,000,000	12	8,000,000	12	10,000,000	12	110,000,000	12	125,000,000	253,000,000		
	Menyediakan Lakip	LAKIP	jumlah laporan		Penyusunan LAKIP	jlh dokumen yg tersusun	BKKBD	4 kali	11,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000			
	Menyediakan SOP	SOP BKKBD	Kesesuaian SOP dengan Struktur organisasi		Penyusunan SOP	jlh dokumen yg tersusun	BKKBD	4 kali	11,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000			
	Menyediakan RKA	RKA	ada at tidaknya RKA		Penyusunan RKA	jlh dokumen yg tersusun	BKKBD	4 kali	11,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000			
	Menyediakan Renstra	Renstra	ada at tidaknya Renstra		Penyusunan Renstra	jlh dokumen yg tersusun	BKKBD	4 kali	11,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000			
	Menyediakan Renja	Renja	ada at tidaknya Renja		Penyusunan Renja	jlh dokumen yg tersusun	BKKBD	1 kali	5,000,000							1	5,000,000			
	Menyediakan Laporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	jumlah laporan		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran erpenuhi	BKKBD	8 kali	14,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	2	4,000,000	2	5,000,000	14,000,000		
					Program Keluarga Berencana (DAK)	jumlah peserta KB aktif	BKKBD		5,222,630,000	14,121	1,122,630,000		1,250,000,000		1,350,000,000		1,500,000,000	5,222,630,000		
	Menyediakan sarana dan prasarana dalam mendekatkan pelayanan KB	Peningkatan akses pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk PLKB,PKB, PPKBD, dan sub PPKBD		Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan KKBPK	tersedianya : sepeda motor, sarana kerja PPKBD/sub PPKBD, balai penyuluh, PC	BKKBD	4 pkt	1,400,000,000		300,936,884		335,080,218		361,886,636		402,096,262	1,400,000,000		
	Menyediakan Sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan KB	Peningkatan Cakupan ber KB	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pelayanan KB		Peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB	tersedianya sarana pel KB, Muyan KB, Gudang obat, kendaraan akseptor	BKKBD	4 pkt	1,458,130,000		313,432,214		348,993,228		376,912,686		418,791,873	1,458,130,000		
	Menyediakan Sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan KIE	Peningkatan pegetahuan masyarakat tentang program KB	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk KIE program KB		Peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan KIE program KB	Tersedianya MUPEN KB, KIE kit, Portable Public address	BKKBD	3 pkt	850,000,000		182,711,680		203,441,561		219,716,886		244,129,873	850,000,000		
	Menyediakan Sarana dan prasarana penunjang Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Peningkatan Cakupan orang tua dalam kelompok BKB yang ber KB	Jumlah orang tua dalam kelompok BKB yang ber KB		Peningkatan sarana dan prasarana fisik pembinaan TUMBANG anak	Tersedianya BKB kit	BKKBD	1 pkt	750,000,000		161,216,188		179,507,260		193,867,841		215,408,712	750,000,000		
					Program Pelayanan Kontrasepsi		BKKBD													
	Menyediakan ALOKON	PeningkatanCakupan PUS ber KB	Jumlah PUS Ber KB		Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan obat side efek	Tersedianya alat kontrasepsi dan obat side efek	BKKBD	4 pkt	400,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000			

NC	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	URUSAN /BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	lokasi	Target Renstra pada tahun 2018(akhir periode Renstra SKPD)		Capaian kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kerja Pada Akhir Periode renstra		Ket
								K	Rp	Tahun I (2015)		Tahun II (2016)		Tahun III (2017)		Tahun IV (2018)		14		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Menyediakan pelayanan TKBK	Penurunan Jumlah anak dalam keluarga	Jumlah anak dalm keluarga		Peningkatan Pelayanan TKBK	rata-rata jlh anak dlm kel = 2,5	BKKBD													
	Menyediakan pelayanan KB pada Faskes	Peningkatan Cakupan PUS ber KB	Jumlah PUS Ber KB		Pelayanan KB pada fasilitas kesehatan (Pemerintah dan swasta)	Jumlah Peserta KB aktif yg terlayani	BKKBD	55,000,000	12	10,000,000	12	12,500,000	12	15,000,000	12	17,500,000				
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja		BKKBD													
	Menyediakan Sarana komunikasi reproduksi remaja	penurunan usia perkawinan dini	Jumlah Perkawinan dini dibandingkan awal tahun renstra		Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	menurunkan jlh pernikahan usia dini = 731	BKKBD	4 kali	119,500,000	1	25,000,000	1	27,500,000		32,000,000	1	35,000,000	119,500,000		
	Menyediakan Sarana komunikasi reproduksi remaja	penurunan usia perkawinan dini	Jumlah Kegiatan		Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi klkp remaja dan sebaya di luar sekolah	Tersedianya forum konseling KRR, teman sebaya	BKKBD	48	120,000,000	12	12,000,000	12	24,000,000	12	36,000,000	12	48,000,000	120,000,000		
	Menyediakan Sarana komunikasi reproduksi remaja	penurunan usia perkawinan dini	Jumlah PIK KRR yang terbentuk selama tahun renstra		Pengembangan PIK KRR	jlh PIK KRR	BKKBD	40 klp	70,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	20,000,000	10	25,000,000	70,000,000		
					Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui klkp kegiatan di masy		BKKBD													
	Menyediakan Sosialisasi KB pada PUS Pesisir	Peningkatan Cakupan KB aktif di pesisir	Cakupan KB aktif di pesisir		Penyuluhan PUS rentan pesisir pantai	cakupan peserta KB aktif	BKKBD													
	Menyediakan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	angka kematian ibu dan anak		Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, anak	BKKBD	48	120,000,000	12	12,000,000	12	24,000,000	12	36,000,000	12	48,000,000	120,000,000		
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Kesehatan Reproduksi remaja		BKKBD													
	Menyediakan Penyuluhan bahaya HIV/AIDS dan NARKOBA pada remaja	Penurunan angka pernikahan dini	Jumlah Pernikahan dini di bandingkan dengan awal tahun renstra		Penyuluhan Bahaya Narkoba, PMS,HIV-AIDS di sekolah	Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Narkoba, PMS,HIV-AIDS	BKKBD	4 kali	176,500,000	1	39,500,000	1	42,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	176,500,000		
					Program Pengembangan Ketahanan Keluarga		BKKBD													
	Mengadakan pembentukan dan pembinaan kelompok BKB,BKR,dan BKL	Peningkatan cakupan KB aktif pada PUS sebagai ortu dalam Kelompok BKB dan BKR	Jumlah Pus sebagai ortu anggota BKB dan BKR yang ber KB		Pembinaan Kelompok BKB,BKR,BKL	Pembentukan Kelompok BKB,BKR,BKL	BKKBD	48	101,250,000	12	5,250,000	12	12,000,000	12	36,000,000	12	48,000,000	101,250,000		
	Mengadakan pembentukan dan pembinaan keluarga sejahtera	Peningkatan Jumlah PPKS yang terbentuk dan terbina	Jumlah PPKS terbentuk di bandingkan awal tahun renstra		Pembentukan dan pembinaan Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera	jlh PPKS yg terbentuk	BKKBD	4	44,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000			
	Mengadakan pelatihan Pendamping Lansia	Peningkatan umur harapan hidup	Jumlah pendamping lansia yang terlatih		Pelatihan tenaga pendamping lansia	jlh tenaga pendamping lansia	BKKBD	8	46,000,000	2	10,000,000	2	11,000,000	2	12,000,000	2	13,000,000			
					Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga		BKKBD													
	Mengadakan sosialisasi manajemen Kelompok UPPKS	Peningkatan ketrampilan manajemen kelompok UPPKS	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun renstra		Sosialisasi pengelolaan manajemen kelompok UPPKS	Cakupan klp UPPKS yang ber-KB	BKKBD	400 org	90,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000			
	Mngadakan Pembinaan kelompok UPPKS	Peningkatan ketrampilan manajemen kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan kelompok UPPKS		Pembinaan kelompok UPPKS	Cakupan klp UPPKS yang ber-KB	BKKBD	120 klp	77,500,000	30	15,000,000	30	17,500,000	30	20,000,000	30	25,000,000			
	Mengadakan Kegiatan pendampingan klkp UPPKS	Peningkatan ketrampilan manajemen kelompok UPPKS	Jumlah kegiatan pendampingan kelompok UPPKS		Kegiatan pendampingan klkp UPPKS	Cakupan klp UPPKS yang ber-KB	BKKBD	120 org	110,000,000	30	20,000,000	30	25,000,000	30	30,000,000	30	35,000,000	110,000,000		
					Program Pembinaan PUS		BKKBD								1					

NC	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	URUSAN /BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	lokasi	Capaian kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode renstra	Ket
								Target Renstra pada tahun 2018(akhir periode Renstra SKPD)		Tahun I (2015)		Tahun II (2016)		Tahun III (2017)		Tahun IV (2018)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode renstra			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	meningkatkan kualitas data basis klinik	kesahihan data dan informasi KB	jumlah klinik yang aktif memasukan data		Peningkatan kualitas data basis klinik	kualitas data basis klinik meningkat	BKKBD	48	78,000,000	12	12,000,000	12	18,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000		78,000,000		
					Program peningkatan kualitas pendataan keluarga		BKKBD														
	Menyusun Peta PUS tingkat Kabupaten	Penentuan Fokus daerah sasaran kerja	ada tidaknya peta PUS tingkat kabupaten		Penyusunan peta PUS tkt kabupaten	Tersusunnya peta PUS tkt kabupaten	BKKBD	4 kali	26,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000		26,000,000		
	Mengadakan sarasehan pendataan tingkat kecamatan	sinkronisasi data antar desa dengan kecamatan	ada tidaknya data sinkronisasi		Sarasehan hasil pendataan kecamatan	Terlaksananya Sarasehan hasil Kabupaten	BKKBD	48 kali	84,000,000	12	12,000,000	12	18,000,000	12	24,000,000	12	30,000,000		84,000,000		
	Mengadakan sarasehan pendataan tingkat kabupaten	sinkronisasi data antar kecamatan dengan kabupaten	ada tidaknya data sinkronisasi		Sarasehan hasil Kabupaten	Terlaksananya Sarasehan hasil Kabupaten	BKKBD	4 kali	110,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000		110,000,000		
	Mengadakan orientasi Pendataan keluarga	Keterampilan PKB/PLKB tentang pendataan keluarga	Jumlah PLKB/PKB yang hadir		Orientasi pendataan keluarga	Terlaksananya Orientasi pendataan keluarga	BKKBD	192	62,400,000	48	12,000,000	48	14,400,000	48	16,800,000	48	19,200,000		62,400,000		
	Mengadakan orientasi dasar Pendataan keluarga	Keterampilan PPKBD/Sub-PPKBD tentang pendataan keluarga	Jumlah PPKBD/ Sub-PPKBD yang hadir		Orientasi kader pendataan keluarga	Orientasi kader pendataan keluarga	BKKBD	2968	296,800,000	742	74,200,000	742	74,200,000	742	74,200,000	742	74,200,000		296,800,000		
									20,198,179,000		4,792,195,966		5,485,972,267		4,652,084,048		5,195,576,720		20,198,179,000		

Ratahan, November 2015
Kepala BKKBD
Kab. Minahasa Tenggara

Anna M. Dotulong, S.Pd, MM
Pembina Tkt.I
NIP 196401061983042001